



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

UNIT KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADIAH CHANDRA SARI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 762485

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 373 m2/224 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 5.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 35.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.340.000.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.340.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

UNIT KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AMELIA PUSPITA DIARDINI
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 473038

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 130.000.000

1. Tanah Seluas 308 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
3. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 6.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
6.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 9.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 145.500.000

III. HUTANG Rp. 187.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -41.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

UNIT KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **KARLINA BATIK**
2. Jabatan : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**
3. NHK : **691997**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 9.325.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 912 m2/225 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 145 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/25 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 95.000.000**

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 55.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.800.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	9.480.800.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.480.800.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

UNIT KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KATRINA
2. Jabatan : PRANATA KOMPUTER MAHIR
3. NHK : 935365

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 110.500.000

1. Tanah Seluas 1.125 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
Rp. 40.500.000
2. Tanah Seluas 1.124 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 62.500.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
7.500.000
2. MOTOR, HONDA SPM.SOLO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000
3. MOTOR, HONDA NF11T11C01 M/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 10.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU AYLA 1.0 X A/T (B100RS-GMQFJ) Tahun
2013, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 298.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 471.000.000

III. HUTANG Rp. 234.143.537

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 236.856.463

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2026/Khusus - Awal Menjabat)****Status Verifikasi Administratif Lengkap****BIDANG : EKSEKUTIF****LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH****UNIT KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : NINI DAMAYANTI
2. Jabatan : PRANATA KOMPUTER MAHIR
3. NHK : 1000340

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	215.000.000
1. MOBIL, MITSUBISHI MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.		
215.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	8.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	223.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	223.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.